

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Struktur Organisasi
4. Fungsi dan Tugas
5. Keadaan Pegawai
6. Keadaan Sarana dan Prasarana
7. Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 adalah :

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

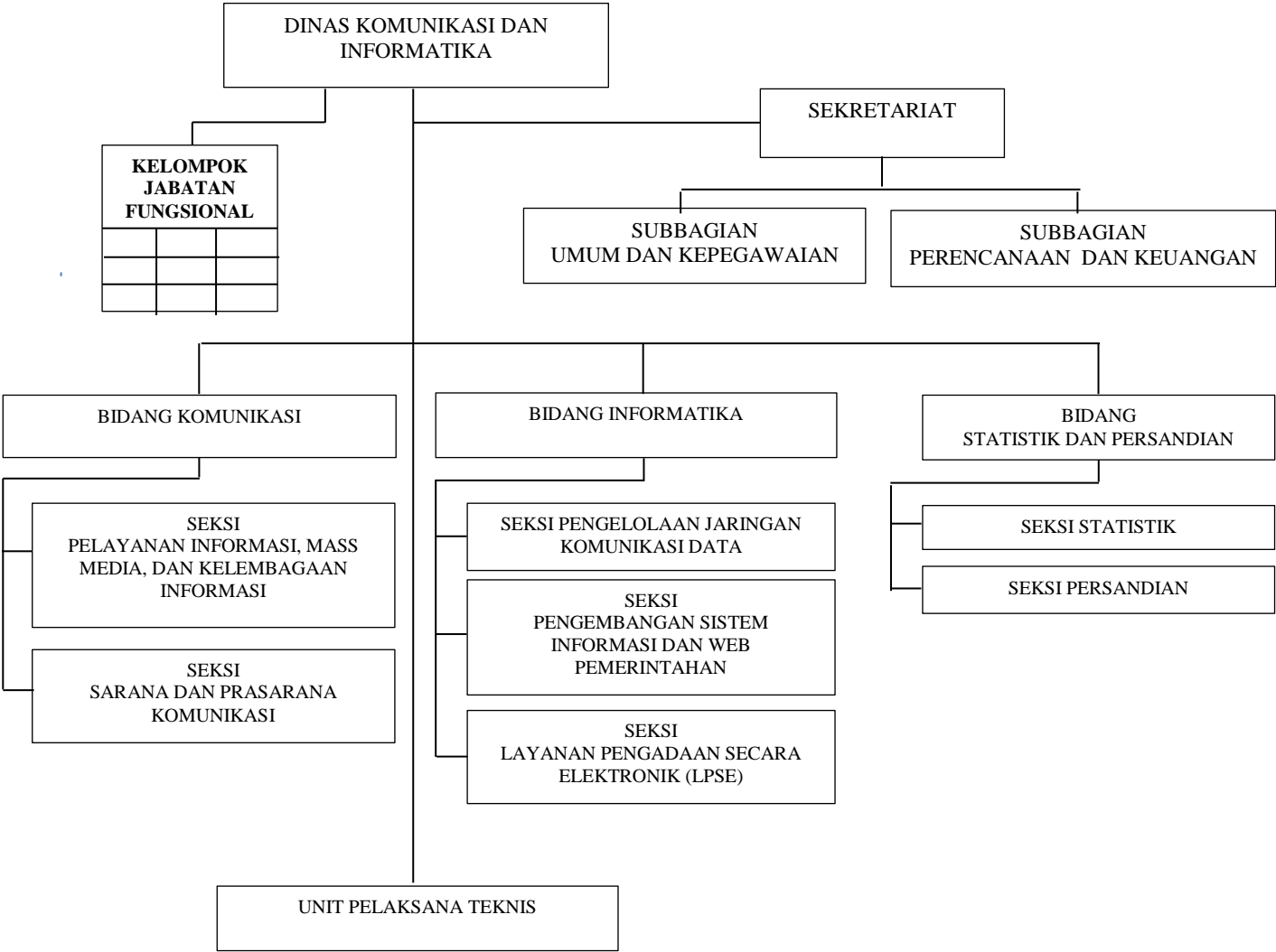
1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 64 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Komunikasi terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi, Mass Media, dan Kelembagaan Informasi.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi
3. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan
 - c. Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Persandian;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah sbb :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Fungsi dan Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Keadaan Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 46 orang pegawai, dengan rincian sbb:

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	35 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	2 orang
Tenaga Kontrak	:	9 orang
Dengan posisi / jabatan sebagai berikut:		
Kepala Dinas (ess. IIb)	:	1 orang
Sekretaris Dinas (ess. IIIa)	:	1 orang
Kabid (ess. IIIb)	:	3 orang
Kasi/Kasubbag (ess. IVa)	:	9 orang
Pejabat Fungsional (Pranata komputer)	:	5 orang
Staf PNS / PTT / Tenaga Kontrak	:	27 orang
Keterangan tambahan	:	1 orang Kabid pensiun per 1 Februari 2017 Kepala Dinas pensiun per 1 September 2017 1 orang Kasi dilantik per 16 Oktober 2017

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
		7		5	1	17	4	1	35

Jumlah PTT dan Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
		1		2		8			11

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																				
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Jumlah
A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	
						2	4	3		6	9	3	5		1	1	1			35

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2017 adalah sbb :

**Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru Tahun 2017**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan roda 4	2 buah	
2	Kendaraan roda 2	10 buah	3 mutasi dari dishub
3	Lemari	4 buah	
4	Meja	132 buah	
5	Laptop	3 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
6	UPS	24 buah	21 Mutasi dari bagian pembangunan, 3 mutasi dari dishub
7	Harddisk eksternal	3 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
8	Router	4 buah	3 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
9	Switch Hub	5 buah	4 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
10	Batteray charger	4 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
11	PC	21 buah	18 Mutasi dari bagian pembangunan, 3 mutasi dari dishub
12	Server	5 buah	4 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
13	Meja rapat	6 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
14	Kursi rapat	14 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
15	Kursi tamu	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
16	AC split	13 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 12 mutasi dari dishub
17	Printer	3 buah	2 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dishub
18	Camera film	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
19	Wireless access point	2 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
20	Peralatan jaringan lain-lain	10 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 9 mutasi dishub
21	Peralatan listrik	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
22	Tool kit boks	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
23	Alat pemadam portable	2 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dari dishub
24	Harddisk internal	3 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
25	Memory	5 buah	3 Mutasi dari bagian pembangunan, 2 mutasi dishub
26	Clearing installation	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
27	Televisi	2 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dari dishub
28	Cctv	4 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 3 mutasi dishub
29	Alat pengaman (sinyal)	2 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
30	Meja panjang	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
31	Kursi putar	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
32	Loudspeaker	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
33	Sound system	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
34	Stabilizer/stavolt	2 buah	1 Mutasi dari bagian pembangunan, 1 mutasi dari dishub
35	Power supply microphone	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
36	Faximile	1 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
37	Microphone table stand	8 buah	Mutasi dari bagian pembangunan
38	GPS	3 buah	Mutasi dari dishub
39	Sofa	1 set	Mutasi dari dishub
40	Gordyn	1 buah	Mutasi dari dishub
41	Kipas angina	1 buah	Mutasi dari dishub
42	Camera video	2 buah	Mutasi dari dishub
43	Note book	1 buah	Mutasi dari dishub
44	Peralatan mainframe computer	1 set	Mutasi dari dishub

45	Scanner	1 buah	Mutasi dari dishub
46	Radio access point	1 buah	Mutasi dari dishub
47	Antene	2 buauh	Mutasi dari dishub
48	Audio cassette recorder	1 buah	Mutasi dari dishub
49	Peralatan studio visual lain-lain	1 buah	Mutasi dari dishub
50	Lensa kamera	1 buah	Mutasi dari dishub
51	Kabel listrik	1 buah	Mutasi dari dishub

1.7. Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2017 mengelola anggaran yang bersumber dari:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp12.563.937.660,00** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.3 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD

Jenis Belanja		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja	
			Jumlah	%
Belanja Operasi	Belanja Pegawai	3.092.971.000	2.658.066.431	73.85
	Belanja Barang dan Jasa	4.688.787.635	4.218.812.250	89.97
Belanja Modal		4.782.179.025	4.127.203.929	86.30
TOTAL		12.563.937.660	11.004.082.610	87.58

1.8. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada PEraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan latar belakang organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organsiasi serta kondisi personil dan sarana prasarana pendukungnya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menjelaskan secara ringkas rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari capaian kinerja dan analisa capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, serta capaian indikator RPJMD yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, kendala dalam pelaksanaan serta langkah-langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Rencana Anggaran Tahun 2017

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yang telah direvisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 tahun 2016 Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Di era reformasi saat ini, penerapan teknologi informasi harus dilakukan oleh instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aktivitas pelayanan kepada publik berbasis teknologi informasi biasa dikenal dengan istilah *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee,

Government to Government).

Sebagai penjabaran dari Visi Kota Banjarbaru yaitu “**Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter**” maka Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Untuk memenuhi harapan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Visi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG HARAT (HANDAL,
AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)”

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai berikut:

- Terwujudnya pelayanan publik yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) adalah terciptanya pelayanan publik di Kota Banjarbaru berbasis elektronik menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga memudahkan masyarakat
- TIK yang Harat (handal, aman, responsif dan terintegrasi) adalah teknologi yang digunakan adalah handal yang kekinian, aman sesuai standar yang ditetapkan, responsif terhadap perkembangan jaman dan terintegrasi (terhubung antara SKPD satu dengan yang lain) sehingga jadi efektif dan efisien

Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, yaitu:

1. Terwujudnya akses dan kualitas layanan informasi publik
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan Tekonologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selama 5 tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Terlaksananya reformasi birokrasi	Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik	Persentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemko sesuai UU No.14 Tahun 2008	n/a	32.6	42.3%	73%	80.7%	100%
			Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan	n/a	15%	40%	65%	90%	100%
			Penyajian informasi publik khususnya Data Statistik Sektor	n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Prosentase unit kerja yang terkoneksi dengan Dinas Kominfo	4%	16%	23%	53%	76%	100%
			Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a	n/a	6%	15%	25%	30%

Strategi Dan Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Misi 1. Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik

Strategi :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pelayanan
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kelurahan
5. Penyajian informasi publik khususnya data statistik sektoral

Kebijakan :

1. Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Program :

1. Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
2. Pengembangan data/informasi/statistik daerah
3. Kerjasama informasi dengan mass media
4. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik

Kegiatan :

1. Fasilitas dan konsultasi sumber daya komunikasi publik
2. Pemantauan isu publik pendapat umum dan aduan masyarakat
3. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
6. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
7. Penyusunan profil daerah

Misi 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**Strategi :**

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet

Kebijakan :

1. Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber
2. Tersedianya infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika

Program :

1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
2. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
3. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
4. Kerjasama informasi dengan mass media
5. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kegiatan :

1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
4. Penyelenggaraan system layanan pengadaan secara elektronik
5. Pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian
6. Perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian
7. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
8. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi
9. Pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi
10. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
11. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

2.2. Perjanjian Kinerja 2017

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Penetapan Kinerja Kota Banjarbaru.

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Perjanjian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik	Persentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemko sesuai UU No.14 Tahun 2008	32.6%	IKU Kota
	Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan	100%	
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan	15%	

	Penyajian informasi publik khususnya Data Statistik Sektoral	Ada	
Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Prosentase unit kerja yang terkoneksi dengan Dinas Kominfo	16%	
	Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	30%	IKU Kota
	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a	

5.3. Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana (murni dan perubahan) sebesar Rp. 12.563.937.660. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sbb :

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
Non Program	Rp 3,052,021,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 983,901,880
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 103,104,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 7,200,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21,999,900
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 6,937,700
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,105,000
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 55,230,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 399,205,280
Penyediaan jasa non PNS	Rp 366,120,000
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1,105,402,525
Pembangunan gedung kantor	Rp 70,900,000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 44,800,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 166,729,075
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 44,834,950
Pengadaan mebeleur	Rp 216,920,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 86,470,000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 41,730,500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 74,998,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 4,630,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 10,800,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 342,590,000
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 123,359,955
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 18,359,955
Pendidikan dan Pelatihan non formal	Rp 105,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 28,639,900
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 22,579,900
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 6,060,000
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 5,110,436,500
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Rp 4,274,694,000
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rp 101,529,000
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Rp 5,310,000
Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 15,000,000
pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian	Rp 15,930,000
perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Rp 7,655,000
penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik	Rp 690,318,500
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000
pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000
Program kerjasama informasi dengan mass media	Rp 1,571,614,900
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp 1,408,670,000
pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana	Rp 162,944,900

teknologi informasi	
program peningkatan akses dan kualitas informasi public	Rp 32,125,000
pemantauan isu publik pendapat umum dan aduan masyarakat	Rp 23,375,000
pelayanan permintaan informasi public	Rp 8,750,000
program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Rp 14,997,500
fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi public	Rp 14,997,500
program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp 221,438,500
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Rp 77,956,000
penyusunan dan analisis data /informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 62,282,500
penyusunan profil daerah	Rp 81,200,000
TOTAL	Rp 12,563,937,660



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Bab III berisi :**
- 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017
 - 2. Akuntabilitas Anggaran

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 sebagaimana yang telah direvisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah dibuat du tahun 2017. Dalam BAB ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2017.

3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru beserta target dan capaian realisasinya dirinci sbb :

Tabel 3.1. Target dan Capaian Sasaran Stretegis Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KET
	Terlaksananya reformasi birokrasi	Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik	Prosentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemko sesuai UU No.14 Tahun 2008	32.6%	32.6%	100%	

			Prosentase tindak lanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan	100%	100%	100%	
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan	15%	15%	100%	
			Penyajian informasi publik khususnya Data Statistik Sektoral	Ada	Ada	100%	
		Mewujudkan penyelenggaraa n pelayanan publik melalui Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Prosentase unit kerja yang terkoneksi dengan Dinas Kominfo	16%	30.26%	189.12%	
			Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	30%	16.93%	56.43%	
			Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2017 dapat dilihat pada penjelasan berikut .

Sasaran 1 : Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik

- Ada 4 indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pertama, yaitu :

1. Prosentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemko sesuai UU No.14 Tahun 2008

Alasan pemilihan indikator adalah karena adanya kewajiban badan publik untuk melaksanakan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah informasi yang disampaikan unit kerja sesuai UU No.14 Tahun 2008 dibagi jumlah informasi publik menurut UU No.14 Tahun 2008 dikali seratus. Target kinerja di tahun 2017 adalah 32.6% dan terealisasi 32,6%.

UU No.14 Tahun 2008 telah secara jelas menyebutkan informasi yang harus disediakan oleh badan publik, baik secara berkala, serta merta maupun tersedia setiap saat. Pada dasarnya, semua SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan informasi ini, hal ini terlihat dari pengisian instrumen Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banjarbaru serta data yang dilampirkan saat

pengisian. Karena itu, capaian realisasi untuk Indikator Kinerja **”Prosentase SOPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik”** dilakukan dengan memetakan daftar informasi badan publik berdasarkan pengisian instrumen Daftar Informasi Publik kedalam 3 range.

Realisasi kinerja dilihat dari jumlah SOPD yang daftar informasi publiknya memiliki prosentase di atas 61%. Dan penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah informasi yang dimiliki oelh badan publik dibandingkan dengan jumlah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010.

Tabel 3.2. Hasil Penilaian terhadap Pengisian Instrumen DIP

KETERANGAN	RANGE		
	0 s.d 30% (KURANG)	31 % s.d 60% (SEDANG)	61 % s.d 100% (BAIK)
JUMLAH BADAN PUBLIK	20	15	17
PERSENTASE	38.46%	28.85%	32.69%

Target pencapaian kinerja pada tahun 2017 adalah 32.6% dengan realisasi 32,6%. Ini berarti realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan (tercapai 100%). Capaian indikator kinerja 32,69% menunjukkan **kinerja sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 8.750.000 dan terealisasi Rp. 8.750.000 atau 100%

2. Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan

Alasan pemilihan indikator karena masih ada unit kerja yang menindaklanjuti laporan keluhan masyarakat *online* melebihi waktu yang telah ditetapkan.

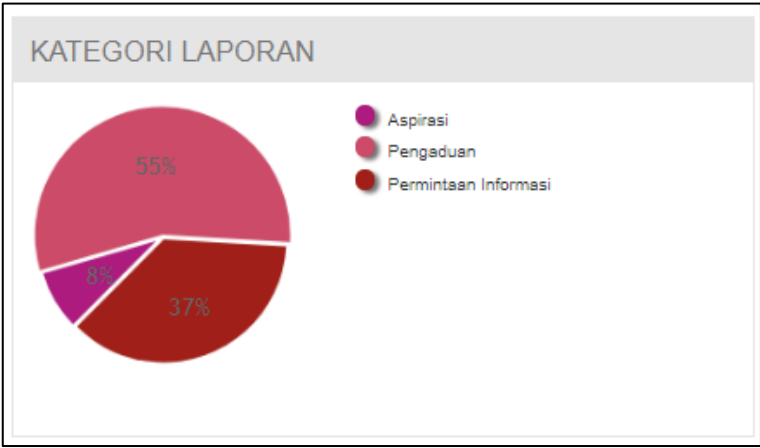
Adapun rekomendasi tenggat penanganan pengaduan adalah sbb :

Tabel 3.3. Rekomendasi Tenggat Penanganan Pengaduan

No	Kategori	Jenis Laporan	Standar Waktu Respon	Contoh Laporan
1	Ringan	Apresiasi, Aspirasi, Permintaan Informasi	Maks 7 hari kerja	Pertanyaan mengenai prosedur, permintaan

				informasi publik
2	Sedang	Pengaduan tidak berkadar pengawasan, penyelesaian oleh satu instansi	Maks. 14 hari kerja	Laporan mengenai standar pelayanan
3	Berat	Pengaduan berkadar pengawasan, indikasi penyalahgunaan wewenang, penyelesaian lintas sektoral	Maks. 30 hari kerja	Laporan pungli, laporan terkait infrastruktur

Di tahun 2017, Pemerintah Kota Banjarbaru menerima 94 pengaduan melalui aplikasi LAPOR!. Dari 94 pengaduan masyarakat, 5 topik yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah tentang pelayanan masyarakat, infrastruktur, administrasi kependudukan, dan kepegawaian. Semua pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LAPOR! telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai dengan SOP. Target pencapaian kinerja pada tahun 2017 adalah 100% dan terealisasi 100%. Ini berarti realisasi telah sesuai target. Capaian kinerja 100% menunjukkan *kinerja sangat baik*.



Gambar 3.1. Grafik pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR!
Berdasarkan kategori laporan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.23.375.000 dan terealisasi Rp. 23.375.000 atau 100%.

3. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan

Alasan pemilihan indikator karena pemberdayaan masyarakat dapat mempercepat proses diseminasi informasi ke masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik, maka keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat penting. Di tahun 2017 target KIM yang terbina adalah 15% (3 KIM) dan hal ini terealisasi 100%. Adapun KIM yang telah terbentuk dan terbina di tahun 2017 adalah KIM Kampung Purun, KIM Lokut Sejahtera, dan KIM Loktabat Selatan Jaya. Capaian kinerja 100% menunjukkan **kinerja sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 14.997.500 dan terealisasi 14.159.000 atau 94,40%



Gambar 3.2 KIM Kampung Purun

4. Penyajian informasi publik khususnya Data Statistik Sektoral

Alasan pemilihan indikator karena publikasi statistik daerah merupakan alat ukur pembangunan di daerah. Keberhasilan kegiatan ini dilihat dari ketersediaan Buku Statistik Kota Banjarbaru dan PDRB.

Pada Tahun 2017, capaian kinerja adalah 100% yang menunjukkan **kinerja sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 221,438,500 dan terealisasi Rp. 217.471.500 atau 93,21%

- **Sasaran 2 : Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Ada 3 indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kedua, yaitu

1. Prosentase unit kerja yang terkoneksi dengan Dinas Kominfo

Alasan pemilihan indikator karena Kebutuhan Komunikasi Data dan pengoperasian aplikasi e-government perlu didukung pengelolaan infrastruktur terpusat.

Kondisi awal di tahun 2017, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah terkoneksi melalui jaringan Wireless Radio LAN termasuk kantor Kecamatan. Jaringan ini pada awalnya dibangun guna mendukung penerapan SIMDA, yakni aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola keuangan dan aset daerah. Namun kadang-kadang koneksi tidak stabil, sehingga pekerjaan jadi terlambat dan aplikasi SIMDA tidak berjalan maksimal. Apalagi saat proses menginput RKA bersamaan, tidak bisa dilakukan di masing-masing SKPD, harus merapat ke BKAD dan dijadwal waktunya. Dalam hal koneksi internet internal SKPD, jaringan yang mendukungnya adalah Speedy yang kuota bandwidthnya bervariasi.

Karena itulah, pembangunan Jaringan *backbone* penghubung antar gedung SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru dengan menggunakan fiber optic menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Jaringan serat optik ini akan menggantikan jaringan *Wireless Radio* yang saat ini digunakan. Dengan penggantian ke teknologi serat optic diharapkan kapasitas dan ketersediaan jaringan *backbone* antar gedung menjadi besar. Direncanakan akan ada pengalokasian *IP Address* di setiap gedung per lantainya menggunakan VLAN, sehingga tingkat keamanan dan ketersediaan IP address terjamin.

Pada akhir tahun 2017, 20 unit kerja telah terhubung melalui fiber optic termasuk Diskominfo, dan 3 unit kerja masih terhubung melalui wireless radio (Kelurahan Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, dan Kel. Loktabat Utara). Jadi total unit kerja yang telah terhubung dengan Diskominfo di tahun 2017 adalah 23 unit kerja. Target unit kerja yang terhubung dengan Diskominfo di tahun 2017 adalah 16% dan terealisasi 30,26%. Cara perhitungan realisasi pencapaian indikator dilakukan melalui rumus :

Jumlah unit kerja yang terhubung dengan jaringan diskominfo

Realisasi = X 100%

Jumlah unit kerja dikali seratus.

Jumlah unit kerja yang ditargetkan terhubung dengan Diskominfo hingga tahun 2021 adalah 76 unit kerja. Nilai capaian 30,26% pada tahun 2017

diperoleh dari 23 unit kerja yang telah terhubung dengan Diskominfo dibagi 76 unit kerja yang menjadi target akhir di tahun 2021 dikali 100%. Nilai capaian 30,26% dari target 16% atau terealisasi 189,12% menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini dapat terealisasi karena pembangunan fiber optic berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah Rp. 4.574.694.000 dan terealisasi Rp. 3.841.491.728 atau 83,97%.

2. Prosentase aplikasi Pemerintahan yang digunakan SKPD dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)=> IKU Kota

Pada sasaran **“Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi”**, salah satu indikator yang juga merupakan indikator kinerja utama Kota Banjarbaru adalah **“Prosentase aplikasi Pemerintahan yang digunakan SKPD dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**. Makna indikator menunjukkan prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung SPBE. Hal ini merupakan sasaran strategis yang terdapat dalam misi keempat sebagaimana tertuang dalam revisi RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yaitu **“Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi”**.

Alasan pemilihan indikator ini karena penerapan SPBE merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi untuk menjamin terlaksananya good governance.

Adapun rumus yang digunakan untuk perhitungan pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah aplikasi e-government SKPD eksisting dibagi jumlah aplikasi e-government SKPD sesuai Masterplan TIK Pemerintah Kota Banjarbaru dikali 100%.

Untuk indikator **“Prosentase SKPD yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**, target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2017 adalah 30%. dan terealisasi 16,93% atau terealisasi 56,43%

Berdasarkan hasil survey saat membuat dokumen Masterplan TIK di Kota Banjarbaru, didapatkan data bahwa saat ini terdapat 118

aplikasi/sistem informasi eksisting di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru yang sebagian besar pengembangannya masih berjalan di masing-masing unit organisasi (SKPD).

Beberapa sistem informasi yang ada merupakan sistem yang diberikan dari pusat sebagai alat bentuk koordinasi, administrasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah, seperti SIMDA Keuangan, SIMDA Barang, SIKDA NPD, SIRUP dan Monev Tepra yang penggunaannya oleh semua SKPD.

Selain itu terdapat pula beberapa aplikasi untuk mendukung operasional layanan, yang diberikan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang terkait, seperti SIAK, SIPPID, LAPOR!, SiMaya, dll

Tabel 3.3 Daftar Aplikasi SKPD eksisting Tahun 2017

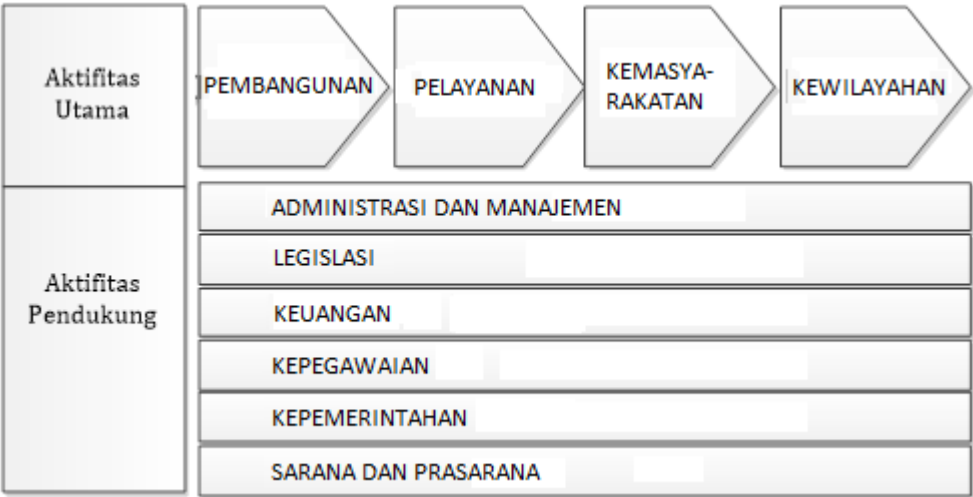
No	SKPD Kota	Jumlah Aplikasi	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	10	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Lelang (SILANG) Sistem Informasi Anjab dan ABK jdih.banjarbarukota.go.id e-GP (Elektronik Giat Pimpinan) humas.banjarbarukota.go.id Sistem Informasi Database Aktivitas Usaha Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru (ULP) ulp.banjarbarukota.go.id pembangunanbag.banjarbarukota.go.id ekobang.banjarbarukota.go.id http://umum.banjarbarukota.go.id
2	Sekretariat DPRD	1	<ul style="list-style-type: none"> dprd.Banjarbarukota.go.id
3	Dinas Kesehatan	5	<ul style="list-style-type: none"> Pcare BPJS e-Puskesmas simala.puskes-sungaibesar.banjarbarukota.go.id dinkes.banjarbarukota.go.id http://sisforla-promkes.dinkes.banjarbarukota.go.id/
4	DPMPTSP	2	<ul style="list-style-type: none"> e-Perijinan dpmpstsp.banjarbarukota.go.id
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Pelaporan Data Bencana (APELDANA) bpbd.banjarbarukota.go.id
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3	<ul style="list-style-type: none"> PBB SIPADA SIMPADA Pendapatan
7	Bakesbangpol	1	<ul style="list-style-type: none"> http://bakesbangpol.banjarbarukota.go.id/
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Geodatabase Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan (E-Pertanahan)

No	SKPD Kota	Jumlah Aplikasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Monev Tepra • SIMPANAN (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan) • Sipd.bappeda.banjarbarukota.go.id • E-Musrenbang • APKK • SILOLA-DAK • bappeda.banjarbarukota.go.id
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan data perekaman e-ktp dan duplicate • SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) • Pencetakan surat keterangan e-ktp • Konsolidasi Pusat • Konsolidasi Daerah • Aplikasi perekaman e-ktp • Aplikasi pencetakan e-ktp • disdukcapil.banjarbarukota.go.id
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	4	<ul style="list-style-type: none"> • INFOPASARKERJA • Banjarbaru.info • ODS • diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id
11	Dinas Lingkungan Hidup	2	<ul style="list-style-type: none"> • kebersihan.dkp.banjarbarukota.go.id • dlh.banjarbarukota.go.id
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	7	<ul style="list-style-type: none"> • aplikasi.bkkbn.go.id • VISUM PLKB • sertifikasi.bkkbn.go.id • Sistem Informasi Desa dan Kelurahan • Sistem Informasi Posyandu • mdcku.net/data • pkk.banjarbarukota.go.id
13	Dinas Perdagangan	2	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pelayanan Informasi Pasar • SIMMELTA
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	2	<ul style="list-style-type: none"> • SLIM V.7 • pustarda.banjarbarukota.go.id
15	Dinas Sosial	1	<ul style="list-style-type: none"> • SIM PKH ONLINE
16	Dinas Pendidikan	3	<ul style="list-style-type: none"> • SINAGALA • DAPODIK • disdik.banjarbarukota.go.id
17	Dinas Perhubungan	1	<ul style="list-style-type: none"> • dishub.banjarbarukota.go.id
18	Dinas Perumahan dan Permukiman	5	<ul style="list-style-type: none"> • GIS PJU • Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum • SIMDA IP (Sistem Informasi Database Infrastruktur Pemukiman) • E-SIAP LAJU (PJU) • disperkim.banjarbarukota.go.id
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8	<ul style="list-style-type: none"> • Cyber extension • SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) • Sistem Informasi Pasar • Simluhan • ISIKHNAS • RPH Gateway • MPO (PSP) • bbtph.banjarbarukota.go.id
20	Kecamatan Liang Anggang	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ahkslia

No	SKPD Kota	Jumlah Aplikasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • kel-landasanulinutara.banjarbarukota.go.id
21	Kecamatan Banjarbaru Utara	3	<ul style="list-style-type: none"> • SIRESTU (SITU Online) • kel-mentaos.banjarbarukota.go.id • kec-bbu.banjarbarukota.go.id
22	Kecamatan Landasan Ulin	2	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Dokumen (DIGDOK) • kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id
23	Kecamatan Banjarbaru Selatan	2	<ul style="list-style-type: none"> • SILORA • kec-bbs.banjarbarukota.go.id
24	Kecamatan Cempaka (Kel.S.Tiung)	5	<ul style="list-style-type: none"> • GARMIN • kel-sungaitiung.banjarbarukota. go.id • kel-palam.banjarbarukota.go.id • kel-cempaka.banjarbarukota.go.id • kec-cempaka.banjarbarukota.go.id
25	Satuan Polisi Pamong Praja	1	<ul style="list-style-type: none"> • satpolpp.banjarbarukota.go.id
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Database Sistem Informasi Geografis Saluran Drainase Jalan Lingkungan Kota Banjarbaru • Database Inventaris Jalan Berbasis ArcGis • Aplikasi Web GIS (Sistem Informasi Geografis) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru • Sistem Informasi Database Sumber Daya Air • SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) • dispupr.banjarbarukota.go.id
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3	<ul style="list-style-type: none"> • bkpp.banjarbarukota.go.id • SIMPEG • SIHARKA
28	RSUD IDAMAN	2	<ul style="list-style-type: none"> • SIM RSUD • rsidaman.banjarbarukota.go.id
29	Dinas Kominfo	11	<ul style="list-style-type: none"> • Apmantel • Pantau CCTV Banjarbaru • SIPPID • Layanan bantuan ticketing online • Kriptosoft • LAPOR! • Si Maya • SIRUP • kominfo.banjarbarukota.go.id • banjarbarukota.go.id • lpse.banjarbarukota.go.id
30	BPKAD	5	<ul style="list-style-type: none"> • SIMDA Keuangan • SIMDA BMD (aset) • SIKDA-NPD • APKK (Aplikasi Pengelola Kinerja Keuangan) • bpkad.banjarbarukota.go.id
31	INSPEKTORAT	0	<ul style="list-style-type: none"> •
32	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	<ul style="list-style-type: none"> • disporabudpar.banjarbarukota.go.id
JUMLAH APLIKASI YANG DIGUNAKAN		118	

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah aplikasi eksisting di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah 118 buah aplikasi. Sebagian besar aplikasi berbasis *web* dengan bahasa pemrograman PHP, maka dapat disimpulkan juga bahwa *database* yang digunakan saat ini adalah MySQL.

Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut terhadap aktivitas Pemerintahan Kota Banjarbaru dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori aktivitas utama dan kategori aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi kewilayahan dan fungsi kemasyarakatan. Sedangkan aktivitas pendukung terdiri atas fungsi administrasi dan manajemen, fungsi legislasi, fungsi keuangan, fungsi kepegawaian, fungsi pemerintahan, dan fungsi sarana dan prasarana. Secara umum model analisis *Value Chain* aktivitas di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru tampak seperti Gambar 3.4.



Gambar 3. 2 *Value Chain* Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

Dukungan aplikasi yang ada di SKPD terhadap aktivitas Pemerintah kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Dukungan Aplikasi Untuk Proses Pemerintahan

Bidang	Proses	Sistem Eksisting
Administrasi dan Manajemen	Kolaborasi dan Koordinasi	e-GP (Elektronik Giat Pimpinan) e-Musrenbanga[
	Manajemen Pelaporan Pemerintahan	APELDANA (Aplikasi PELaporan Data Bencana)
	Repositori Dokumen elektronik	Slims V.7 Digitalisasi Dokumen (DIGDOK)
	Sistem Pendukung Keputusan	Silang Online (Sistem Informasi Lelang) SIMPANAN (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan)
	Surat Elektronik	Si MAYA
	Industri dan Perdagangan	Sistem Informasi Pasar
Kemasyarakatan	Jaring Pengaman Sosial	SIM PKH Online
	Kesehatan	Sistem Informasi Posyandu
		Pcare BPJS

		e-Puskesmas www.mdkku.net/data
	Ketenagakerjaan	INFOPASARKERJA
	Pangan dan Pertanian	SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)
	Pendidikan	DAPODIK SINAGALA
Kepegawaian	Absensi dan Penggajian	SIMPEG
	Pengadaan PNS	
	Sistem Administrasi Kepegawaian	VISUM PLKB
		Sistem Informasi Anjab dan ABK
	Sistem Pendidikan dan Pelatihan	sertifikasi.bkkbn.go.id
	Sistem Penilaian Kinerja	Sistem Informasi Anjab dan ABK aplikasi.bkkbn.go.id
Kepemerintahan	Katalog Barang Daerah	
	Keuangan	SIMDA
	Pengelolaan Barang Daerah	SIMDA BMD
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	SIMPADA Pendapatan
Keuangan	Akuntansi Daerah	MKAS
	Anggaran	
	Kas dan Perbendaharaan	SIMDA
Kewilayahan	Kebencanaan	APELDANA
	Pangan dan Pertanian Daerah	Cyber extension SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)
	Pariwisata	http://disporabudpar.banjarbarukota.go.id
	Potensi Daerah	Banjarbaru.Info
	Tata ruang dan Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Geodatabase Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan (E-Pertanahan)
	UMKM	
Legislasi	Katalog hukum, peraturan dan perundang-undangan	jdi.Banjarbarukota.go.id
	Sistem Administrasi DPRD	
	Sistem Pemilu Daerah	
Pelayanan	Bisnis dan Investasi	
	Kependudukan	SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Aplikasi pencetakan e-ktip Aplikasi perekaman e-ktip Konsolidasi Daerah Konsolidasi Pusat Pencetakan surat keterangan e-ktip Pengecekan data perekaman e-ktip dan duplicate
	Pendaftaran dan Perizinan	e-Perizinan
	Pengaduan Masyarakat	LAPOR (Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat) GIS PJU
	Perpajakan dan Retribusi	PBB SIPADA E-BILLING DJP
	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan APELDANA (Aplikasi Pelaporan Data Bencana) http://humas.banjarbarukota.go.id http://umum.banjarbarukota.go.id http://ekobang.banjarbarukota.go.id http://ulp.banjarbarukota.go.id

		http://pembangunanbag.banjarbarukota.go.id http://dinkes.banjarbarukota.go.id http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id http://bpbd.banjarbarukota.go.id http://bappeda.banjarbarukota.go.id http://disdukcapil.banjarbarukota.go.id http://diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id http://dlh.banjarbarukota.go.id http://pustarda.banjarbarukota.go.id http://disdik.banjarbarukota.go.id http://dishub.banjarbarukota.go.id http://disperkim.banjarbarukota.go.id http://bbtph.banjarbarukota.go.id http://kel-landasanulinutara.banjarbarukota.go.id http://kec-bbu.banjarbarukota.go.id http://kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id http://kec-bbs.banjarbarukota.go.id http://kel-sungaitiung.banjarbarukota.go.id http://kel-palam.banjarbarukota.go.id http://kel-cempaka.banjarbarukota.go.id http://kec-cempaka.banjarbarukota.go.id http://satpolpp.banjarbarukota.go.id http://dispupr.banjarbarukota.go.id http://bkpp.banjarbarukota.go.id http://rsidaman.banjarbarukota.go.id http://lpse.banjarbarukota.go.id http://bpkad.banjarbarukota.go.id http://simala.puskes-sungaibesar.banjarbarukota.go.id http://banjarbarukota.go.id http://kel-mentaos.banjarbarukota.go.id http://kominfo.banjarbarukota.go.id http://kpu-banjarbarukota.go.id http://dprd.banjarbarukota.go.id
Pembangunan	Pengelolaan dan Monitoring	
	Perencanaan Pembangunan	e-musrenbang
	SIM Data Pembangunan	Sistem Informasi Databe Aktivitas Usaha Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru (ULP)
	Sistem Evaluasi dan Informasi hasil pembangunan	Monev Tepra
	Sistem Pengadaan Barang	
		SILANG (Sistem Informasi Lelang)
Sarana Prasarana		SIRUP
	Sarana Umum	
	Transportasi	

Tabel 3. 5 Data Kondisi Aplikasi Eksisting di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang	Proses	Kaitan dengan bidang lain	Kebutuhan Aplikasi	Data	Aplikasi Eksisting	Kondisi	Rekomendasi
Administrasi dan Manajemen	Manajemen Pelaporan Pemerintahan				E-GP (Elektronik Giat Pimpinan)		
Administrasi dan Manajemen	Repositori Dokumen		Sistem Dokumen Elektronik	Repositori dokumen elektronik	Digdog, Slims v.7		
Administrasi dan Manajemen	Pendukung Keputusan		SPK untuk Lelang	Data lelang, pemilihan supplier	Silang Online (Sistem Informasi Lelang)		
Kemasyarakatan	Kesehatan		Pendataan peserta KB	Data pembinaan peserta KB	www.mdkku.net/data		Dilengkapi dengan fitur SMS-gateway untuk reminder pemeriksaan kesehatan KB
Kemasyarakatan	Kesehatan		Monitoring Kesehatan Ibu dan Anak	Data kesehatan ibu dan anak	Sistem Informasi Posyandu		Dilengkapi dengan fitur peta spasial untuk memudahkan monitoring kondisi kesehatan ibu dan anak
Kemasyarakatan	Ketenagakerjaan		Informasi Bursa Tenaga Kerja	Data ketenagakerjaan	INFOPASARKERJA		Dilengkapi kolaborasi dengan mitra bisnis agar dapat langsung posting iklan lowongan kerja
Kemasyarakatan	Industri dan Perdagangan		Sistem Informasi Pasar	Data aktivitas perekonomian di pasar	Sistem Informasi Pasar		Konten dilengkapi
Kemasyarakatan	Jaring Pengaman Sosial		Pendataan penerima bansos	Data penerima bansos	SIM PKH Online		

Bidang	Proses	Kaitan dengan bidang lain	Kebutuhan Aplikasi	Data	Aplikasi Eksisting	Kondisi	Rekomendasi
Kemasyarakatan	Pangan dan Pertanian		Pendataan lahan pertanian dan perkebunan, hasil produksi pertanian dan perkebunan	Data lahan pertanian dan hasil produksinya	Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)/ Simluhkan		
Kemasyarakatan	Pendidikan	Pelayanan-Publikasi informasi umum dan pemerintahan	Perpustakaan daerah	Data perpustakaan daerah dan wilayah/sekolah	Slims V.7	Hanya digunakan di perpustakaan daerah	Dikostumisasi agar dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan instansi lainnya
Pelayanan	Pengaduan Masyarakat		Pengaduan masyarakat secara online	Data pengaduan	LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), GIS PJU		
Pelayanan	Perpajakan dan Retribusi		Pembayaran pajak PBB dan BPHTB online	Data retribusi dan perpajakan	PBB		
Pelayanan	Perpajakan dan Retribusi		Pendaftaran wajib pajak online, pembayaran pajak online	Data wajib pajak	SIPADA		
Pelayanan	Kependudukan		Sistem informasi kependudukan	Data kependudukan	SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)		
Pelayanan	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		Website SKPD		http://humas.banjarbaru.go.id		
					http://umum.banjarbaru.go.id		
					http://ekobang.banjarbaru.go.id		
					http://ulp.banjarbaru.go.id		
					http://pembangunanbag.b		

Bidang	Proses	Kaitan dengan bidang lain	Kebutuhan Aplikasi	Data	Aplikasi Eksisting	Kondisi	Rekomendasi
					anjarbarukota.go.id		
					http://dinkes.banjarbaru.go.id		
					http://dpmpstsp.banjarbaru.go.id		
					http://bpbd.banjarbaru.go.id		
					http://bappeda.banjarbaru.go.id		
					http://disdukcapil.banjarbaru.go.id		
					http://diskopukmnaker.banjarbaru.go.id		
					http://dlh.banjarbaru.go.id		
					http://pustarda.banjarbaru.go.id		
					http://disdik.banjarbaru.go.id		
					http://dishub.banjarbaru.go.id		
					http://disperkim.banjarbaru.go.id		
					http://bbtph.banjarbaru.go.id		
					http://kel-landasanulinutara.banjarbaru.go.id		
					http://kec-bbu.banjarbaru.go.id		
					http://kec-landasanulin.banjarbaru.go.id		

Bidang	Proses	Kaitan dengan bidang lain	Kebutuhan Aplikasi	Data	Aplikasi Eksisting	Kondisi	Rekomendasi
					ota.go.id		
					http://kec-bbs.banjarbarukota.go.id		
					http://kel-sungaitiung.banjarbarukota.go.id		
					http://kel-palam.banjarbarukota.go.id		
					http://kel-cempaka.banjarbarukota.go.id		
					http://kec-cempaka.banjarbarukota.go.id		
					http://satpolpp.banjarbarukota.go.id		
					http://dispupr.banjarbarukota.go.id		
					http://bkpp.banjarbarukota.go.id		
					http://rsidaman.banjarbarukota.go.id		
					http://lpse.banjarbarukota.go.id		
					http://bpkad.banjarbarukota.go.id		
					http://simala.puskes-sungaibesar.banjarbarukota.go.id		
					http://banjarbarukota.go.id		
					http://kel-		

Bidang	Proses	Kaitan dengan bidang lain	Kebutuhan Aplikasi	Data	Aplikasi Eksisting	Kondisi	Rekomendasi
					mentaos.banjarbarukota.go.id		
					http://kominfo.banjarbarukota.go.id		
					http://kpu-banjarbarukota.go.id		
					http://dprd.banjarbarukota.go.id		
Pembangunan	Evaluasi dan informasi hasil pembangunan	Pelayanan-Pengaduan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Data indeks survey kepuasan masyarakat	GIS PJU		
			Pelaporan kinerja dan keuangan		SIRUP, MONEV, Monev Tepra		
	Sistem pengelolaan barang dan aset daerah		Pengawasan Inventarisasi Aset	Data barang dan asset daerah	SIMDA BMD, SIMDA PENDAPATAN		
	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan	Kewilayahan-Potensi Daerah	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan	Data dasar keluarga, potensi desa/ kelurahan, perkembangan desa/ kelurahan	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan		Perlu dilengkapi dengan infografis dan template yang memudahkan aparat Desa untuk mengisikan data
Kewilayahan	Tataruang dan LH		Pemanfaat dan penggunaan lahan	Data peruntukan lahan	Sistem Informasi Geodatabase Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan (E-Pertanahan)		
	Pangan dan Pertanian		Aplikasi Penyuluh Petani Lapangan	Data penyuluh petani lapangan	Cyber extension		
	Tataruang dan LH		Jasa Konstruksi		SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi)		

Bidang	Proses	Kaitan dengan bidang lain	Kebutuhan Aplikasi	Data	Aplikasi Eksisting	Kondisi	Rekomendasi
			Sumber daya air		Sistem Informasi Database Sumber Daya Air		
			Drainase dan Jalan Lingkungan		Aplikasi Database Sistem Informasi Geografis Saluran Drainase Jalan Lingkungan Kota Banjarbaru		
	Kebencanaan		Laporan bencana alam	Data Kebencanaan	APELDANA		Dibuat berbasis mobile untuk memudahkan proses pengaduan
Kepegawaian	Sistem Administrasi Kepegawaian		Sistem kepegawaian	Data kepegawaian	aplikasi.bkkbn.go.id		
	Absensi dan Penggajian		Sistem informasi kepegawaian	Data kepegawaian	SIMPEG		Perlu dikaji kemungkinan mengintegrasikan dan menerapkan SIMPEG terintegrasi di semua SKPD yang mencakup fungsi-fungsi umum
	Sistem penilaian kinerja		Kinerja Pegawai	Kegiatan harian penyuluh KB	VISUM PLKB	Hanya untuk BKKBN	
			Analisis beban kerja pegawai	Data beban kerja, penugasan, dan standar kinerja	Sistem Informasi Anjab dan ABK		
	Pendidikan dan pelatihan		Ujian sertifikasi penyuluh KB	Data sertifikasi penyuluh KB	sertifikasi.bkkbn.go.id		
Sarana prasarana	Transportasi		Inventarisasi jalan		Database inventaris jalan berbasis arcgis		
Legislasi	Katalog Hukum, peraturan dan perundang-undangan		Dokumen peraturan/perundang-undangan	Peraturan, penundang-undangan	jdih.Banjarbarukota.go.id		

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan aplikasi, pembangunan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dibagi menjadi 3 skala prioritas sbb :

1. Prioritas I termasuk pada kategori aplikasi penyedia data dasar/master dan aplikasi transaksi sebagai penyedia data bagi data master. Aplikasi ini misalnya basis data kependudukan, kewilayahan, bisnis dan UMKM, basis data sarana prasarana kesehatan, dan seterusnya
2. Prioritas II adalah aplikasi yang termasuk pada pendukung integrasi antar aplikasi pada prioritas I serta penyedia data untuk kebutuhan analisis data dan pengambilan keputusan
3. Prioritas III adalah aplikasi pengambil keputusan serta alat bantu monitoring kinerja ataupun target-target program pembangunan seperti peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas lingkungan dan lain-lain.

Tabel 3.6. Roadmap Pengembangan Aplikasi Berdasarkan Prioritas sesuai Dokumen Masterplan TIK Kota Banjarbaru

No	Kegiatan	Sub-Klaster	Klaster	Prioritas		
				I	II	III
1	Sistem Monitoring Pelaksanaan SOP	Manajemen Pelaporan Pemerintahan	Administrasi dan Manajemen			x
2	Sistem Monitoring Kinerja SKPD	Manajemen Pelaporan Pemerintahan	Administrasi dan Manajemen			x
3	Sistem Pendukung Keputusan Administrasi Pemerintahan	Sistem Pendukung Keputusan	Administrasi dan Manajemen		x	
4	Sistem persuratan elektronik	Surat Elektronik	Administrasi dan Manajemen	x		
5	Sistem Informasi pelatihan kewirausahaan	Industri dan Perdagangan	Kemasyarakatan		x	
6	Sistem Pencatatan dan Pembinaan PKL	Industri dan Perdagangan	Kemasyarakatan	x		
7	Sistem Pendataan dan Pembinaan Koperasi	Industri dan Perdagangan	Kemasyarakatan	x		
8	Sistem Informasi Pemantauan Produksi Pertanian/perkebunan	Industri dan Perdagangan	Kemasyarakatan			x
9	Sistem Informasi Kejadian dan Penanganan Kriminalitas	Jaring Pengaman Sosial	Kemasyarakatan		x	
10	Sistem Monitoring dan Pembinaan Keluarga Miskin	Jaring Pengaman Sosial	Kemasyarakatan			x
11	Sistem Pelatihan Petugas Linmas	Jaring Pengaman Sosial	Kemasyarakatan		x	
12	Sistem monitoring kamtribmas	Jaring Pengaman Sosial	Kemasyarakatan			x
13	Sistem Pendataan dan Pembinaan Ormas	Jaring Pengaman Sosial	Kemasyarakatan	x		
14	Sistem Pendataan dan Pembinaan Orpol	Jaring Pengaman Sosial	Kemasyarakatan	x		

15	Sistem Informasi Pelayanan Program KB	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
16	Sistem monitoring data kematian	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
17	Sistem monitoring penyakit menular dan KLB	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
18	sistem monitoring penderita HIV dan penyakit spesifik lainnya	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
19	Sistem Manajemen Pelatihan dan karir bagi tenaga bidang kesehatan	Kesehatan	Kemasyarakatan		x	
20	Sistem Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
21	Sistem Pemeliharaan dan evaluasi Sarana dan prasarana Puskesmas	Kesehatan	Kemasyarakatan		x	
22	Pencatatan Obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
23	Pencatatan data gizi buruk dan pelayanannya	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
24	Pencatatan data kondisi ibu hamil dan melahirkan	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
25	Pencatatan kondisi kesehatan lansia	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
26	sistem monitoring kondisi lingkungan dan air	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
27	Pencatatan data pelaksanaan posyandu	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
28	Monitoring data bantuan operasional Puskesmas	Kesehatan	Kemasyarakatan			x
29	Pencatatan layanan kesehatan untuk keluarga tidak mampu	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
30	Situs/aplikasi promosi program kesehatan daerah	Kesehatan	Kemasyarakatan		x	
31	Aplikasi kegawatdaruratan kesehatan 119	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
32	aplikasi monitoring standar layanan kesehatan	Kesehatan	Kemasyarakatan			x
33	Sistem pelayanan asuransi kesehatan terpadu	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
34	Sistem Pelaporan Kegawatdaruratan Keamanan 119	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
35	Sistem Integrasi Pelayanan Puskesmas untuk Keluarga Miskin	Kesehatan	Kemasyarakatan	x		
36	Sistem Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Kemasyarakatan	x		
37	Pengembangan aplikasi DAPODIK dan TAKOLA	Pendidikan	Kemasyarakatan	x		
38	Monitoring Program Pendidikan Pemerintah (Indonesia Pintar, keaksaraan, berbasis karakter, Adiwiyata, dll)	Pendidikan	Kemasyarakatan		x	
39	Pendataan kelembagaan kursus dan pendidikan luar sekolah	Pendidikan	Kemasyarakatan		x	
40	Perizinan pendirian kelembagaan/kursus dan pendidikan luar sekolah	Pendidikan	Kemasyarakatan	x		
41	Pengembangan Aplikasi Monitoring dukungan transportasi untuk pelajar	Pendidikan	Kemasyarakatan		x	

42	Sistem manajemen sarana/prasarana pendidikan (Gedung, ruang kelas)	Pendidikan	Kemasyarakatan		x	
43	Pengembangan aplikasi perpustakaan untuk perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah	Pendidikan	Kemasyarakatan		x	
44	Aplikasi pusat data peserta didik	Pendidikan	Kemasyarakatan	x		
45	Sistem informasi PMB	Pendidikan	Kemasyarakatan	x		
46	Sistem Informasi Monitoring Sarana/prasarana Produksi Ternak dan perikanan	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Kemasyarakatan	x		
47	Sistem Informasi Monitoring Produktivitas hasil ternak dan perikanan	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Kemasyarakatan		x	
48	Sistem Informasi Profil ASN daerah	Administrasi Kepegawaian	Kepegawaian	x		
49	Sistem informasi Pengadaan Pegawai	Pengadaan Pegawai	Kepegawaian	x		
50	Sistem Informasi Pengendalian Internal	Kuangan	Kepemerintahan			x
51	Sistem Monitoring Penyelesaian Masalah Asset dan Barang Daerah	Pengelolaan barang daerah	Kepemerintahan		x	
52	Sistem Informasi Peringatan Dini Bencana	Kebencanaan	Kewilayahan	x		
53	Sistem Informasi Pelaporan Potensi Bencana	Kebencanaan	Kewilayahan		x	
54	Sistem Informasi Layanan dan Monitoring Kebakaran	Kebencanaan	Kewilayahan	x		
55	Sistem Monitoring Sumber Pangan Alternatif	Pangan dan Pertanian Daerah	Kewilayahan		x	
56	Sistem Informasi Pembinaan Daerah Mandiri	Pangan dan Pertanian Daerah	Kewilayahan		x	
57	Sistem Pengawasan Kelestarian Sumber daya perikanan	Pangan dan Pertanian Daerah	Kewilayahan	x		
58	Sistem Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	Pangan dan Pertanian Daerah	Kewilayahan	x		
59	Sistem Informasi Ketahanan Pangan Daerah	Pangan dan Pertanian Daerah	Kewilayahan	x		
60	Sistem Promosi Pariwisata dan Budaya Daerah	Pariwisata	Kewilayahan		x	
61	Sistem Manajemen Potensi Wisata	Pariwisata	Kewilayahan		x	
62	Sistem Manajemen Asset Sejarah dan Budaya Daerah	Pariwisata	Kewilayahan			x
63	Sistem Promosi dan Informasi Kesadaran tentang Kebangsaan dan Bela negara	Pemuda dan Olahraga	Kewilayahan			x
64	Pencatatan kegiatan olahraga tingkat daerah	Potensi Daerah	Kewilayahan		x	
65	Monitoring Prestasi olahraga	Potensi Daerah	Kewilayahan		x	
66	Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	Potensi Daerah	Kewilayahan	x		
67	Sistem Informasi Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Penanaman Modal	Potensi Daerah	Kewilayahan		x	
68	Situs Promosi Potensi Investasi Daerah	Potensi Daerah	Kewilayahan	x		
69	Sistem monitoring polusi udara	Tata ruang dan Lingk.Hidup	Kewilayahan	x		
70	Sistem Monitoring Pemeliharaan Taman dan RTH	Tata ruang dan Lingk.Hidup	Kewilayahan		x	
71	Sistem Informasi Ruang Mandiri	Tata ruang dan	Kewilayahan		x	

		Lingk.Hidup				
72	Sistem penataan dan monitoring kawasan pemukiman	Tata ruang dan Lingk.Hidup	Kewilayahan	x		
73	Sistem Informasi Jaringan Air Minum	Tata ruang dan Lingk.Hidup	Kewilayahan	x		
74	Sistem Promosi Produk UMKM	UMKM	Kewilayahan	x		
75	Sistem Pendampingan dan Pembinaan UMKM	UMKM	Kewilayahan	x		
76	Sistem Repositori SOP dan Standar Pelayanan	Sistem Dokumentasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Legislasi	x		
77	Sistem Monitoring Penyelesaian Sengketa Terkait Perda/Perkada	Sistem Pemilu Daerah	Legislasi			x
78	Sistem Pelayanan Investasi dan Izin Usaha Daerah	Bisnis dan Investasi	Pelayanan	x		
79	Sistem Pendaftaran dan Perizinan Terpadu	Pendaftaran dan Perizinan	Pelayanan	x		
80	Sistem Pengurusan KIR dan Uji Kendaraan Online	Pendaftaran dan Perizinan	Pelayanan	x		
81	Sistem Monitoring Kepuasan Layanan Publik	Pengaduan Masyarakat	Pelayanan			x
82	Sistem Pengurusan Pajak Kendaraan Online	Perpajakan dan Retribusi	Pelayanan	x		
83	Sistem Informasi Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah	Perpajakan dan Retribusi	Pelayanan	x		
84	Sistem Informasi Publik	Publikasi informasi umum dan pemerintahan	Pelayanan	x		
85	Sistem Monitoring Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Data Pembangunan	Pembangunan			x
86	Evaluasi dan informasi hasil pembangunan	Evaluasi dan informasi hasil pembangunan	Pembangunan			x
87	Sistem Penatausahaan Keuangan dan Investasi Daerah	Pengelolaan dan Monitoring	Pembangunan	x		
88	Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Publik	Pengelolaan dan Monitoring	Pembangunan		x	
89	Sistem Monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan	Pengelolaan dan Monitoring	Pembangunan			x
90	Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Pengelolaan dan Monitoring	Pembangunan		x	
91	Sistem Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Pembangunan	x		
92	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Sistem Pengadaan Barang	Pembangunan	x		
93	Sistem Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem Pengadaan Barang	Pembangunan	x		
94	Sistem Pemeliharaan Drainase dan Gorong-gorong	Sarana Umum	Sarana Prasarana	x		
95	Sistem Monitoring Kondisi Jaringan Irigasi	Sarana Umum	Sarana Prasarana	x		
96	Sistem Manajemen Pengelolaan Sampah	Sarana Umum	Sarana Prasarana	x		
97	Sistem Monitoring Akses Jaringan dari SKPD ke Diskominfo	Sarana Umum	Sarana Prasarana	x		

98	sistem Informasi Jasa Konstruksi	Sarana Umum	Sarana Prasarana		x	
99	Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat	Sarana Umum	Sarana Prasarana			x
100	Sistem Monitoring Pembangunan Jalan dan Jembatan	Transportasi	Sarana Prasarana		x	
101	Sistem Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Drainase	Transportasi	Sarana Prasarana	x		
102	Sistem Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Transportasi	Sarana Prasarana	x		
103	Sistem Monitoring dan Pengamanan Lalu Lintas	Transportasi	Sarana Prasarana		x	
Total				58	29	16

Berdasarkan hasil survey, dari 10 bidang yang menjadi urusan pemerintahan, telah tersedia 118 aplikasi di SKPD yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang jika diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, akan terbagi lagi menjadi 21 jenis, yaitu : kolaborasi dan koordinasi (mis : e-GP, simaya), manajemen pelaporan pemerintahan, repository dokumen (mis : Slims v.7), pendukung keputusan (Sllang online), kesehatan (e-Puskesmas), ketenagakerjaan (infopasarkerja), industry dan perdagangan (sistem informasi pasar) ,jaring pengaman social (SIM PKH Online) , pangan dan pertanian (Slmluhtan), pendidikan, pengaduan masyarakat (LAPOR!), perpajakan dan retribusi (SIPADA), kependudukan (SIK), publikasi informasi umum dan pemerintahan (mis : website SKPD, sistem informasi desa dan kelurahan), evaluasi dan informasi hasil pembangunan (mis : SIRUP, MONEV TEPR), sistem pengelolaan barang dan asset daerah (SIMDA BMD), tata ruang dan LH (mis : e-pertanahan, SIPJAKI), pangan dan pertanian (mis : cyber extension), kebencanaan (APELDANA), kepegawaian (SIMPEG, sistem informasi anjab dan ABK), transportasi (database inventaris jalan berbasis argis), serta katalog hukum, peraturan dan perundang-undangan (jdih.banjarbarukota.go.id).

Bila dibandingkan dengan roadmap rencana pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (prioritas I) pada dokumen Masterplan TIK Kota Banjarbaru, maka dari target 30% di tahun 2017 telah terealisasi 16,93 %. Nilai ini diperoleh dari : jumlah aplikasi eksisting di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (berdasarkan fungsinya) dibagi dengan jumlah aplikasi SKPD yang tersedia sesuai masterplan TIK. Sedangkan jumlah aplikasi SKPD yang tersedia sesuai masterplan merupakan penjumlahan dari aplikasi eksisting di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

(berdasarkan fungsinya) dengan jumlah aplikasi sesuai roadmap pengembangan aplikasi (prioritas I) berdasarkan masterplan TIK , sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) =

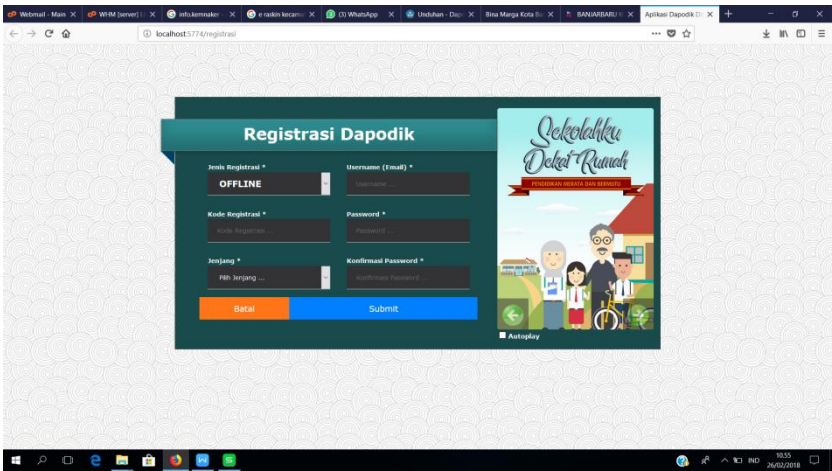
$$\frac{21}{21+58} \times 100\% = 16,93\%$$

Catatan :

Jumlah aplikasi berdasarkan dokumen Masterplan = jumlah aplikasi eksisting + jumlah aplikasi yang akan dikembangkan (prioritas I)

Nilai capaian di tahun 2017 ini merupakan kondisi awal dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Nilai ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat capaian di tahun 2016, karena menggunakan cara penghitungan yang berbeda dengan makna indikator yang berbeda pula.

Dukungan dana untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah Rp. 5.310.000 dan terealisasi Rp. 5.296.000 atau 84,98%.



Gambar 3.3 Contoh Aplikasi Eksisting di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

3. Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Alasan pemilihan indikator karena informasi merupakan aset yang penting bagi sebuah organisasi, karenanya memerlukan keamanan yang handal.

Namun, pada praktiknya untuk menerapkan persandian sebagai pengamanan informasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sulit dilakukan, mengingat paradigma persandian saat ini sudah jauh berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

Pada tahun 2017, belum ada target karena kegiatan di bidang persandian masih difokuskan pada pembuatan regulasi, memperbanyak referensi terkait kegiatan persandian, serta memperbanyak koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Dukungan dana untuk kegiatan persandian adalah Rp. 23.585.000 dan terealisasi Rp. 20.732.998 atau 87.90%

Selain Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan di atas, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru juga dapat dilihat dari beberapa indikator lainnya :

1. Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi yang termonitoring

Di tahun 2017, target sarana dan prasarana teknologi informasi yang termonitoring adalah 4 lokasi dan telah terealisasi 100%. Ini berarti target yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Di tahun 2018, kewenangan telekomunikasi tidak lagi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, karena itu sarana dan prasarana teknologi informasi yang termonitoring tidak lagi menjadi target Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

2. Jumlah fasilitas umum yang menyediakan layanan wifi

Berdasarkan rencana, di tahun 2017 fasilitas umum yang menyediakan layanan wifi adalah 1 buah dan terealisasi sebanyak 5 buah. Adapun lokasi pemasangan wifi sbb :

- RTH. Bumi Cahaya Bintang (Kelurahan Sungai Besar)
- Kampung Pelangi (Kelurahan Gt.Paikat)
- Taman Van Der Pijl (Kelurahan Komet)
- Kampung Pejabat (Kelurahan Loktabat Selatan)
- Kampung Internet (Kelurahan Landasan Ulin Timur)

Tiap titik wifi yang telah dipasang juga menyediakan free-wifi. Hal ini sebagai dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menuju *smart city*. Capaian kinerja 5 buah wifi dari 1 wifi yang ditargetkan, menunjukkan **kinerja sangat baik**.



Gambar 3.4. Fasilitas wifi di Kampung Pelangi

3. Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi

Di tahun 2017, sarana dan prasarana teknologi informasi difokuskan pada pembuatan aplikasi untuk menjangkau opini publik terhadap program-program Pemerintah Kota Banjarbaru. Target pencapaian kinerja adalah pembuatan 1 aplikasi dan terealisasi 1 aplikasi (Aplikasi "Kayapa Jar Pian"). Ini berarti realisasi telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja 100% menunjukkan **kinerja sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 162.944.900 dan terealisasi Rp. 148.592.661 atau 91,19%

4. Jumlah SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru yang menggunakan domain resmi banjarbarukota.go.id.

Indikator kedua untuk pencapaian sasaran "**Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**" adalah jumlah SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru yang menggunakan domain resmi banjarbarukota.go.id. Target SKPD yang menggunakan domain resmi banjarbarukota.go.id di tahun 2017 adalah 20 SKPD. Realisasinya, di tahun 2017 ada 30 SKPD yang telah menggunakan domain resmi banjarbarukota.go.id atau 150%. Ini berarti realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan (lebih dari 100%). Capaian kinerja 30 SKPD dari 20 SKPD yang menjadi target menunjukkan kinerja **sangat baik**.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 101.529.000 dan terealisasi Rp. 86.341.000 atau 85,04%.

6. Jumlah standar yang terpenuhi dalam penyelenggaraan LPSE sesuai standar LPSE : 2014

Targetnya, di tahun 2017 jumlah standar yang terpenuhi dalam penyelenggaraan LPSE sesuai standar LPSE:2014 adalah 12. Namun, realisasinya baru tercapai 10. Kendala dalam pemenuhan target disebabkan karena LKPP belum melakukan verifikasi faktual di lapangan walaupun permohonan telah diajukan. Capaian kinerja 10 standar dari 12 standar yang harus terpenuhi menunjukkan kinerja **baik**.

7. Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Target pemenuhan layanan administrasi perkantoran di tahun 2017 adalah 100% dan terealisasi 100%, baik dalam penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, SDA, dan listrik, jasa kebersihan, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan, makanan dan minuman, rapat koordinasi serta penyediaan jasa non PNS. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

8. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi sesuai standar Permendagri Nomor 7 Tahun 2006

Target pemenuhan sarana dan prasarana aparatur adalah 100% dan terealisasi 100%. Realisasi diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan mobil/kendaraan dinas, gedung kantor yang sudah direhab/diperbaiki, tersedianya meubeler, serta perlengkapan dan peralatan kantor lainnya sesuai permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

9. Jumlah temuan dari BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Target temuan dari BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah 100% dan hal ini telah terealisasi 100%. Capaian kinerja 100% menunjukkan kinerja **sangat baik**.

3.2. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Dinas Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2017 sebesar 87,58% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (2017)			ANGGARAN			KET.
				TARGE T	REALIS ASI	%	TARGET	REALISASI	%	
	Terlaksana nya reformasi birokrasi	Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan publik	Prosentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemko sesuai UU No.14 Tahun 2008	32.6%	32.6%	100%	Rp. 8.750.000	Rp. 8.750.000	100%	
			Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan	100%	100%	100%	Rp.23.375.000	Rp. 23.375.000	100%.	
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan	15%	15%	100%	Rp. 14.997.500	Rp. 14.159.000	94,40%	
			Penyajian informasi publik khususnya Data Statistik Sektoral	Ada	Ada	100%	Rp. 221,438,500	Rp. 217.471.500	93,21%	
		Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Prosentase unit kerja yang terkoneksi dengan Dinas Kominfo	16%	30.26 %	189.12 %	Rp. 4.574.694.000	Rp. 3.841.491.728	83,97%.	
			Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	30%	16.93 %	56.43 %	Rp. 5.310.000	Rp. 5.296.000	84,98%.	
			Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	Rp. 23.585.000	Rp. 20.732.998	87.90%	

Pada sasaran “**Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur jaringan**” dengan indikator “**Jumlah fasilitas umum yang menyediakan layanan wifi**”, didapatkan efisiensi sebesar 500%. Nilai efisiensi ini didapatkan, karena dari target 1 buah wifi, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil menyediakan 5 buah layanan wifi. Hal ini merupakan hasil kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan pihak penyedia layanan (PT. TELKOM.Tbk) dan tidak ada anggarannya.

Pada sasaran “**Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur jaringan**” dengan indikator “**Meningkatnya SKPD yang terkoneksi dengan Diskominfo**”, didapatkan efisiensi sebesar 16,36%. Nilai efisiensi didapat karena penawaran dari pemenang tender turun 15,30% atau setara dengan Rp. 487.401.600 dari nilai PAGU. Demikian pula dengan pembuatan Master Plan pada program pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Nilai tender turun 10% dari nilai PAGU atau setara dengan Rp. 29.135.000.

Pada sasaran yang sama dengan indikator “**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai standar permendagri nomor 7 tahun 2006**” juga didapatkan efisiensi sebesar 9,03%. Nilai efisiensi ini didapatkan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan pendukung untuk mencapai sasaran “**Meningkatkan akuntabilitas kinerja**”. Terdapat 2 kegiatan yang memiliki nilai efisiensi lebih dari 30%, yaitu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (31,03%) dan yaitu dan kegiatan penyediaan jasa non PNS (40.31%). Nilai efisiensi ini didapatkan karena pengeluaran untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disesuaikan dengan keperluan. Demikian pula dengan penyediaan jasa non PNS di tahun 2017.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
Non Program	Rp 3,052,021,000	Rp 2,630,691,431	Rp 421,329,569	86.20%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 983,901,880	Rp 801,375,960	Rp 182,525,920	81.45%
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp -	100.00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 103,104,000	Rp 71,112,385	Rp 31,991,615	68.97%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	Rp -	100.00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15,000,000	Rp 13,718,500	Rp 1,281,500	91.46%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21,999,900	Rp 21,763,000	Rp 236,900	98.92%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 6,937,700	Rp 6,797,200	Rp 140,500	97.97%
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,105,000	Rp 6,090,000	Rp 15,000	99.75%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 55,230,000	Rp 54,635,000	Rp 595,000	98.92%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 399,205,280	Rp 398,509,875	Rp 695,405	99.83%
Penyediaan jasa non PNS	Rp 366,120,000	Rp 218,550,000	Rp 147,570,000	59.69%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1,105,402,525	Rp 1,005,538,735	Rp 99,863,790	90.97%
Pembangunan gedung kantor	Rp 70,900,000	Rp 69,650,000	Rp 1,250,000	98.24%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 44,800,000	Rp 42,433,000	Rp 2,367,000	94.72%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 166,729,075	Rp 156,162,925	Rp 10,566,150	93.66%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 44,834,950	Rp 39,942,316	Rp 4,892,634	89.09%
Pengadaan mebeleur	Rp 216,920,000	Rp 214,810,000	Rp 2,110,000	99.03%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 86,470,000	Rp 86,470,000	Rp -	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 41,730,500	Rp 30,992,500	Rp 10,738,000	74.27%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 74,998,000	Rp 8,657,994	Rp 66,340,006	11.54%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 4,630,000	Rp 4,630,000	Rp -	100.00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 10,800,000	Rp 10,800,000	Rp -	100.00%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 342,590,000	Rp 340,990,000	Rp 1,600,000	99.53%
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 123,359,955	Rp 99,230,000	Rp 24,129,955	80.44%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 18,359,955	Rp 18,350,000	Rp 9,955	99.95%
Pendidikan dan Pelatihan non formal	Rp 105,000,000	Rp 80,880,000	Rp 24,120,000	77.03%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 28,639,900	Rp 27,392,600	Rp 1,247,300	95.64%
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 22,579,900	Rp 21,842,600	Rp 737,300	96.73%
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 6,060,000	Rp 5,550,000	Rp 510,000	91.58%
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 5,110,436,500	Rp 4,342,617,123	Rp 767,819,377	84.98%
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Rp 4,274,694,000	Rp 3,575,452,728	Rp 699,241,272	83.64%
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rp 101,529,000	Rp 86,341,000	Rp 15,188,000	85.04%
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Rp 5,310,000	Rp 5,296,000	Rp 14,000	99.74%
Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 15,000,000	Rp 6,900,000	Rp 8,100,000	46.00%
pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian	Rp 15,930,000	Rp 13,497,998	Rp 2,432,002	84.73%
perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Rp 7,655,000	Rp 7,235,000	Rp 420,000	94.51%
penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik	Rp 690,318,500	Rp 647,894,397	Rp 42,424,103	93.85%
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	Rp 33,961,000	88.68%
pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp 300,000,000	Rp 266,039,000	Rp 33,961,000	88.68%
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	Rp 9,060,000	54.70%
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp 20,000,000	Rp 10,940,000	Rp 9,060,000	54.70%

Program kerjasama informasi dengan mass media	Rp 1,571,614,900	Rp 1,556,502,261	Rp 15,112,639	99.04%
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp 1,408,670,000	Rp 1,407,909,600	Rp 760,400	99.95%
pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi	Rp 162,944,900	Rp 148,592,661	Rp 14,352,239	91.19%
program peningkatan akses dan kualitas informasi public	Rp 32,125,000	Rp 32,125,000	Rp -	100.00%
pemantauan isu publik pendapat umum dan aduan masyarakat	Rp 23,375,000	Rp 23,375,000	Rp -	100.00%
pelayanan permintaan informasi publik	Rp 8,750,000	Rp 8,750,000	Rp -	100.00%
program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	Rp 838,500	94.41%
fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi public	Rp 14,997,500	Rp 14,159,000	Rp 838,500	94.41%
program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp 221,438,500	Rp 217,471,500	Rp 3,967,000	98.21%
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Rp 77,956,000	Rp 76,489,000	Rp 1,467,000	98.12%
penyusunan dan analisis data /informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 62,282,500	Rp 60,117,500	Rp 2,165,000	96.52%
penyusunan profil daerah	Rp 81,200,000	Rp 80,865,000	Rp 335,000	99.59%
TOTAL	Rp 12,563,937,660	Rp 11,004,082,610	Rp 1,559,855,050	87,58%

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Kendala dan Solusi

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun pertama dari

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik.

Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam pencapaian sasaran memang ada yang belum dapat terealisasi atau masih dibawah target. Namun beberapa indikator kinerja yang lain realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan partisipasi semua pihak. Untuk target-target yang belum tercapai di tahun ini perlu dicarikan solusi agar dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.

Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 12,563,937,660** yang dialokasikan untuk 12 program dan non program serta 42 kegiatan. Penyerapan anggaran di tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 11.004.082.610** atau 87,58%

Penyerapan anggaran terendah ada pada Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebesar 54,70% dan penyerapan anggaran tertinggi adalah 100% pada program peningkatan akses dan kualitas informasi publik.

Dari dua sasaran yang ditetapkan, terdapat tujuh indikator kinerja utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, satu indikator kinerja utama (IKU) belum memenuhi target, satu indikator utama tidak menetapkan target kinerja dan enam indikator utama telah memenuhi target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target realisasi adalah :

1. Prosentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Secara kuantitas aplikasi yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) cukup banyak, baik berupa aplikasi yang dikembangkan sendiri, maupun aplikasi yang diberikan oleh pusat melalui kementerian terkait. Belum tercapainya target disebabkan karena aplikasi yang ada (eksisting) belum selaras dengan roadmap pengembangan aplikasi berdasarkan dokumen Masterplan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru. Karena itu untuk aplikasi yang sudah tersedia, perlu ditinjau kembali kelengkapan fitur terhadap proses yang harus didukung. Sedangkan untuk aplikasi yang akan dibangun/dikembangkan perlu menyelaraskan dengan roadmap pengembangan aplikasi yang telah dibuat.

Indikator Kinerja Utama yang mencapai dan atau melebihi target realisasi adalah :

1. Prosentase informasi publik yang disampaikan unit kerja lingkup Pemko sesuai UU No.14 Tahun 2008
2. Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan
3. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan
4. Penyajian informasi publik khususnya Data Statistik Sektor
5. Prosentase unit kerja yang terkoneksi dengan Dinas Kominfo

4.2. Kendala dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2017 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada kegiatan **penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**, penyerapan anggaran 68,97%. Hal ini karena pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulannya tidak dapat diprediksi. Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi sebesar 31,03%.

Pada kegiatan **penyediaan jasa non PNS**, penyerapan anggaran 59,69%.

Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi 40,31 %, karena penyediaan jasa

non PNS di tahun 2017 disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2017.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kendala :

Pada kegiatan **pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional** penyerapan anggaran hanya 11,54%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Belum ada berita acara penyerahan kendaraan dinas/operasional
- b. Mutasi kendaraan dinas/operasional dari SKPD lain baru didapat pada akhir tahun

Solusi :

Memperbanyak koordinasi, baik itu terkait dengan perencanaan anggaran maupun SKPD yang akan menyerahkan kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kendala :

Pada kegiatan **pendidikan dan pelatihan non formal**, dari PAGU Rp. 105.000.000,- yang terserap adalah Rp. 80.880.000,- atau 77,03%. Hal ini disebabkan karena kurangnya referensi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Solusi :

Memperbanyak referensi tentang pendidikan dan pelatihan non formal yang sesuai dengan kebutuhan pegawai serta membuat jadwal pelaksanaannya.

4. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Pada kegiatan **pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi**, penyerapan anggaran 83,64%. Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi sebesar 16,36%. Nilai efisiensi didapat karena penawaran dari pemenang tender turun 15,30% atau setara dengan Rp. 487.401.600 dari nilai PAGU.

- Pada kegiatan **pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi**, Tim e-Government yang direncanakan akan dibentuk kembali di tahun 2017, tidak terealisasi. Hal ini disebabkan, karena hampir semua anggota Tim e-Government yang terbentuk pada tahun 2016 (sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50

tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru), merupakan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, sehingga di tahun 2017 pembentukan Tim e-Government dirasa tidak perlu lagi.

- Pada kegiatan **monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi**, penyerapan anggaran 46%. Hal ini disebabkan karena kewenangan telekomunikasi tidak lagi berada di Dinas Komunikasi dan Informasi pada pertengahan tahun anggaran.
- Pada kegiatan yang mendukung seksi persandian, yaitu **pembinaan dan pengembangan sarana, prasarana persandian serta perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian** secara keseluruhan penyerapan anggaran diatas 80%. Namun, pada praktiknya untuk menerapkan persandian sebagai pengamanan informasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sulit dilakukan. Solusi yang ditawarkan adalah memperbanyak referensi terkait kegiatan persandian, serta memperbanyak koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, karena paradigma persandian saat ini sudah jauh berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

5. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pada kegiatan **pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi** dalam hal ini adalah pembuatan Master Plan terdapat nilai efisiensi 11,32% Hal ini disebabkan karena nilai tender turun dari nilai PAGU.

6. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.

Kendala :

Kegiatan **Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi** merupakan kegiatan baru menggunakan anggaran perubahan. Dari 3 pelatihan yang telah dianggarkan, hanya 2 pelatihan yang terealisasi karena keterbatasan waktu.

Solusi

Kegiatan pelatihan SDM sebaiknya tidak menggunakan anggaran perubahan, tetapi menggunakan anggaran murni.

7. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kendala :

Secara keseluruhan penyerapan anggaran pada program ini diatas 95%. Kendala ada pada pelaksanaan di lapangan, yaitu keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pengumpulan data statistik. Saat ini pengelolaan dan pengumpulan data statistik dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pembina (BPS Kota Banjarbaru). Namun hal ini berdampak pada penyelesaian tugas yang menjadi sangat tergantung pada instansi pembina.

Solusi :

Menambah kualitas dan kuantitas SDM dibidang statistik.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2017. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.